

**ALASAN PRESIDEN DONALD TRUMP MENARIK AMERIKA SERIKAT
DARI *PARIS AGREEMENT* PADA TAHUN 2017**

JURNAL



Disusun oleh:

Ulfa Setyaningtyas

20150510013

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Ulfa Setyaningtyas

NIM : 20150510013

Jenjang Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (Jurnal Ilmiah) yang disusun oleh yang
bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk
kepentingan akademis.

Yogyakarta, 11 Mei 2019

Ulfa Setyaningtyas

Alasan Presiden Donald Trump Menarik Amerika Serikat dari *Paris Agreement*
pada Tahun 2017

*(The reason President Donald Trump pulled the United States from the Paris
Agreement in 2017)*

Ulfa Setyaningtyas

20150510013

Ulfa.setyaningtyas.2015@fisipol.umy.ac.id
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

This paper describes the reasons the United States withdrawal from the Paris Agreement under President Donald Trump in the year 2017. The role of the United States in climate change as long as it is weak, especially global climate action. During the reign of Barack Obama, the United States made a new breakthrough by ratifying the Paris Agreement under the umbrella of the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), the global climate change regime. However, during the reign of Donald Trump, President of the United States withdrew from the Paris Agreement in 2017. This study uses the theory of Role in international relations by K. J. Holsti. Role theory describes the reasons President Donald Trump pull United States of the Paris Agreement that focuses on the preference of Donald Trump and the platform of the Republican Party and political support in the country supported by a broader perspective constructivist explaining a discrepancy regarding the deal in the Paris Agreement with the platform of the Republican Party whose primary agenda is the development of the technology of production and export of energy United States as the main supplier of energy in the world dependent on fossil fuels.

.Keyword: *Global Political Environment, Paris Agreement, Donald Trump*

PENDAHULUAN

Pemanasan global akibat emisi gas karbon atau rumah kaca merupakan isu lingkungan global yang dewasa ini dinilai termasuk dalam isu lingkungan global yang paling krusial. Adapun komponen yang paling dominan dan persisten adalah karbon dioksida. Permasalahan emisi gas rumah kaca ini timbul dari berbagai penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi bahan bakar dasar dari kebutuhan energy yang dipakai dalam setiap jenis aktivitas industry modern. Dewasa ini, seiring dengan semakin pesatnya pengembangan industry dan teknologi, membuat penggunaan bahan bakar fosil juga semakin meningkat. Oleh karena itu, ancaman dampak buruk atas terjadinya perubahan iklim semakin besar pula jika tidak dilakukan upaya pencegahan atau adaptasi dampak perubahan iklim dimasa mendatang. Sebagai salah satu upaya negara-negara di dunia dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim, dibentuklah Protokol Kyoto yang diadopsi di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997. Mengakui bahwa negara-negara maju pada dasarnya bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi GRK di atmosfer sebagai akibat dari lebih dari 150 tahun kegiatan industri, Protokol Kyoto menempatkan beban yang lebih berat pada negara-negara maju di bawah prinsip "tanggung jawab bersama tetapi berbeda". AS sebagai satu-satunya negara adidaya sekaligus negara industry terbesar di dunia tidak meratifikasi kesepakatan tersebut, hanya sampai dengan tahap penyetujuan pada era pemerintahan Bill Clinton. Kemudian, benar-benar keluar dari Kyoto Protocol 1997 pada masa George W Bush tahun 2001.

Pada 12 Desember 2015 di Perancis, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mengesahkan kesepakatan baru sebagai agenda lanjutan atas berakhirnya Protokol Kyoto, yakni Kesepakatan Paris berbentuk COP21 yang menjadi tonggak penting dalam tata kelola iklim global dimana kesepakatan tersebut memuat tujuan global untuk adaptasi perubahan iklim, termasuk secara terpisah menyebut tentang kerusakan dan kerugian akan dampak

perubahan iklim yang disebut *Paris Agreement*. Sejauh ini, *Paris Agreement* telah diratifikasi oleh 183 Pihak dari 197 Pihak UNFCCC.¹

Amerika membuat terobosan baru dalam agenda iklim global dengan diratifikasinya Paris Agreement pada tahun 2016 dibawah kepemimpinan Barack Obama. Langkah tersebut tentu saja diharapkan negara-negara lain di dunia mengingat posisi AS sebagai pemimpin global dan juga menempati urutan kedua penyumbang gas emisi karbon terbesar di dunia mencapai 17,89% dari rata-rata pembagian emisi karbon global yang meliputi 197 Pihak UNFCCC.². Selain itu, AS menjadi contributor aktif dalam Paris Agreement maupun UNFCCC meskipun keputusan ratifikasi dihasilkan berdasarkan perjanjian eksekutif yang dilakukan Barack Obama tanpa persetujuan Kongres AS. Namun, setelah pergantian kekuasaan menuju era Donald Trump. Keputusan tersebut kembali diperdebatkan dengan diutarakan janji kampanye Donald Trump yang menyatakan akan menarik AS keluar dari Paris Agreement dan dibuktikan dengan tindakan eksplisit setelah Trump terpilih menjadi presiden AS ke 45 berupa diumumkannya penarikan diri AS pada 1 Juni 2017. Keputusan tersebut mendapat pertentangan dari mayoritas negara di dunia, penggiat lingkungan dan iklim, hingga sejumlah perusahaan-perusahaan besar AS sehingga menurunkan kembali harapan dunia pada kepemimpinan global dalam isu perubahan iklim.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif (deskriptif). Unit analisa merupakan suatu perilaku atau fenomena yang hendak diamati yakni keputusan Presiden dalam Paris Agreement pada tahun 2017. Sedangkan, unit eksplanasinya terkait dengan *Paris Agreement* itu sendiri dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

¹ UNTC, “*Paris Agreement*”, Chapter XXVII, diakses dari https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=XXVII-7&chapter=27&lang=en&clang=en pada tanggal 9 November 2018 pukul 09.34

² Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 7 Maret 2018 pukul 19.16

Sumber-sumber data yang digunakan meliputi berbagai literature yang berkaitan dengan cakupan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penulis berusaha mengulas kejanggalan yang ada dan membahas mengenai alasan dibalik diambilnya keputusan Donald Trump dalam penarikan AS dari aksi iklim global, Paris Agreement, setelah sebelumnya keputusan ratifikasi pada pemerintahan sebelumnya dibawah kepemimpinan Barack Obama dinilai sebagai sebuah terobosan baru sekaligus harapan baru bagi dunia terhadap kepemimpinan global AS dalam isu perubahan iklim. Penulis akan menggunakan *Role Theory* yang didukung oleh perspektif konstruktivis dalam Kebijakan Luar Negeri dalam menganalisa perilaku politik Donald Trump dan indikator utama yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut. Teori peran akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat terkait dengan konsepsi peran suatu negara dan pengambil keputusan serta korelasi antara analisis kebijakan luar negeri dengan system internasional. Secara umum, teori ini mengkaji mengenai karakteristik suatu agen atau actor terhadap karakteristik system yang ada dan sebaliknya, termasuk interaksi antar keduanya.

Teori peran pertama kali dikemukakan oleh K.J. Holsti melalui karyanya yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* pada tahun 1970. Konsepsi peran yang dikemukakan oleh K.J. Holsti tersebut mengambil ide dari George Herbert Mead mengenai karakteristik atau perilaku seseorang dapat memengaruhi konsepsi individu yang berlandaskan pada konsepsi dari diri sendiri (ekspektasi diri) atau disebut dengan “ego” dan konsepsi yang berasal dari luar atau “alter”. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk dari tindakan atau keputusan suatu negara dimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh adanya konsepsi peran “ego” dan preskripsi peran “alter” diikuti oleh status negara tersebut. Holsti mengklasifikasikan analisis terhadap peran negara dipengaruhi oleh konsepsi peran itu sendiri, status negara, harapan maupun tuntutan peran dari negara lain. Konsepsi peran yang dikemukakan oleh Holsti, yakni: (1) *role performance*, merupakan perilaku atau tindakan suatu negara atau pemerintahan,

(2) *national role conceptions*, yakni faktor internal atau ego sebagai pandangan suatu negara, (3) *role prescriptions*, meliputi harapan peran suatu negara dalam system internasional, (4) *position*, yang meliputi status nasional dari suatu negara.³ *Role theory* menegaskan bahwa perilaku dalam menjalankan suatu peran politik disebut perilaku politik. Perilaku politik ini dipengaruhi atau terjadi karena adanya harapan atau tuntutan atas peran aktor politik tersebut dimana aktor diharapkan, dituntut, atau diduga akan berperilaku tertentu. Sedangkan harapan tersebut dapat bersumber dari orang lain terhadap pemegang peran tersebut atau bersumber dari persepsi atau sudut pandang dari aktor itu sendiri terhadap peran yang sedang dipegang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sikap AS dalam isu perubahan iklim dan *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Barack Obama menunjukkan dukungan yang kuat terhadap isu perubahan iklim, diikuti dengan langkah-langkah konkret, pencapaian paling besarnya adalah dengan diratifikasinya *Paris Agreement* pada tahun 2016. Pada masa kampanye pemilihan Presiden AS yang ke-45 dengan Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik dan Hillary Clinton sebagai kandidat dari Partai Demokrat, perpolitikan AS semakin terpolarisasi dengan semakin jelasnya keberpihakan dan kesenjangan yang tinggi antara konservatif dan liberal dalam merespon berbagai isu, utamanya isu perubahan iklim. Untuk memahami perilaku Donald Trump dalam isu perubahan iklim, dapat diamati dari perilaku para pendahulunya asal Partai Republik yang diketahui sejalan dan sesuai dengan ortodoksi platform yang diusung oleh Partai Republik.

Pada tahun 1997 dibawah kepemimpinan Bill Clinton, AS membuat terobosan baru dengan menandatangani *Kyoto Protocol 1997* sebagai langkah awal sekaligus keseriusan AS untuk terlibat dalam aksi iklim global melalui reduksi gas rumah kaca melalui agenda-agenda UNFCCC. Meskipun, kesepakatan tersebut pada akhirnya di gagalkan pada masa pemerintahan George W Bush. Kemudian, kebijakan dan aksi iklim AS mulai menguat di masa pemerintahan Obama dengan

³ Holsti, “*National Role Conceptions*”, 240

terobosan baru lainnya dalam menunjukkan dukungan AS dalam agenda iklim global, yakni meratifikasi *Paris Agreement 2015* sebagai agenda iklim lanjutan dari berakhirnya Protokol Kyoto.

Preferensi pribadi Donald Trump sangat mempengaruhi diambil keputusan tersebut dimana Presiden Donald Trump cenderung pesimistis terhadap hal-hal mengenai pemanasan global dan menganggap bahwa ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam *Paris Agreement* justru akan mematikan daya saing Amerika. Pandangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha besar sekaligus seorang *republican*. Berdasarkan platform partai asal Donald Trump yakni Partai Republik menyatakan bahwa isu perubahan iklim bukanlah isu yang mendesak sehingga sangat perlu diprioritaskan. Republik lebih mendukung pengembangan teknologi dan produksi energi. Dengan jumlah sumber energy AS yang besar, Republik mendukung UU atau peraturan terkait pengelolaan sumber daya energy, modernisasi pipa dan jaringan listrik, peningkatan ekspor energy, dan pengurangan biaya energy untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan cadangan minyak yang besar dimasa depan. Meskipun begitu, Republik juga tetap mendukung pengembangan energi terbarukan karena energi dinilai sangat penting.⁴

Paris Agreement menyepakati target pengurangan emisi karbon yang berarti negara perlu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai tujuan tersebut. Mekanisme *Paris Agreement* ini bukan dengan meminta negara-negara terlibat untuk mengurangi emisi gas karbon di negara mereka secara substantif, namun meminta negara-negara tersebut mematuhi procedural pelaporan terhadap upaya domestik yang akan ditinjau secara berkala. Republik berkomitmen untuk menghapus kebijakan tersebut dikarenakan batubara dinilai sebagai sumber energi lokal yang sangat penting, melimpah, bersih, terjangkau, dan dapat diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian AS.

Sejak tahun 2004, Partai Republik telah menjadi lebih konservatif dan lebih homogen dalam isu pemanasan global. Platform Partai Republik memang lebih

⁴ The Committee on Arrangements for the 2016 Republican National Convention. (2016). *Republican Platform 201*. US: Republican National Convention.

memperhatikan permasalahan produksi dan ekspor energy untuk mencapai keuntungan ekonomi dan menjaga dominasi AS di dunia. Didukung oleh sebagian besar pendukung Partai Republik berasal dari kalangan profesional dan pengusaha. Berbeda dengan demokrat yang lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dan kesepakatan-kesepakatan baru yang ada dan sebagian besar kalangan pendukungnya justru berasal dari kelompok-kelompok minoritas.

George H W Bush lebih mirip dengan Ricard Nixon dimana keduanya menjadi presiden yang cukup memperhatikan masalah lingkungan dikarenakan aspirasi dan dorongan masyarakat. Bill Clinton, presiden asal Demokrat bersama Albert Gore sebagai wakilnya yang juga dikenal sebagai tokoh yang gencar mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim melakukan langkah penting berupa ditandatanganinya *Kyoto Protokol* 1997 pada saat COP ke-4 tahun 1998. Pada tahun 1997, Partai Republik mengambil kursi dengan Demokrat di Senat untuk menghalangi ratifikasi *Kyoto Protocol* 1997. Memasuki masa pemerintahan George W Bush asal Republik, langkah-langkah atau upaya yang telah dilakukan Clinton dalam mendukung aksi iklim benar-benar dihapuskan, misalnya penarikan AS dari *Kyoto Protocol* 1997 pada tanggal 29 Maret 2001. Beralih ke era kepemimpinan Barack Obama dimana ia dikenal vocal dalam mengkampanyekan dampak perubahan iklim melalui progresifnya kebijakan-kebijakan iklim pada masa pemerintahan Obama hingga membuat para ahli konservatif dan libertarian semakin mengkhawatirkan permasalahan biaya karbon yang tentu saja akan berdampak pada biaya energy yang lebih tinggi bagi keluarga maupun pebisnis. Kebijakan Trump tercermin dan tidak jauh-jauh dari sikap para pendahulunya dari Partai Republik sejak masa Ronald Reagan, meskipun sedikit berbeda dengan George H W Bush yang pada awal pemerintahannya.

Platform Partai Republik lebih mengutamakan bagaimana menciptakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor energy AS sehingga dapat meningkatkan dominasi AS di pasar energy dunia. Termasuk didalamnya meningkatkan produksi batu bara, minyak, dan gas alam yang dikelola di tanah publik dan hal itu juga sejalan dengan kebijakan Partai

Republik sejak era Reagan hingga sekarang ini. Dibawah kepemimpinan Reagan tercatat bahwa jumlah izin pengemboran gas dan minyak di lahan publik meningkat hingga 30% dibandingkan era Carter. Pada masa George W Bush , jumlah perizinan pengeboran minyak dan gas naik hingga 3 kali lipat. Pola yang sama juga dapat diamati dari kebijakan di dua tahun terakhir George H W Bush dimana ia juga memprioritaskan kebijakannya pada sector energy dan menolak untuk terlibat dalam upaya menghadapi perubahan iklim melalui reduksi dan stabilisasi emisi gas karbon atau gas rumah kaca.⁵

Segera setelah Trump menjabat sebagai presiden AS ke-45, ia membuat kebijakan *Energy Independence Executive Order* yang dibentuk untuk menghentikan sejumlah kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Obama, membangun program pembangunan *Keystone XL Pipeline* dan the *Dakota Access Pipeline* serta membuka akses untuk mempermudah pengembangan energi di lahan public, dan memotong anggaran alokasi *National Oceanic, Atmospheric Administration*, dan *National Environmental Satellite, Data, and Information Service*, serta dua entitas besar yang melaporkan data iklim bagi pemerintah AS dan negara-negara lainnya. Merujuk kembali pada platform Partai Republik yang menyebutkan bahwa isu perubahan iklim bukanlah merupakan isu yang sangat serius sehingga diperlukan langkah-langkah penting dan pembiayaan yang besar dan lebih penting untuk mendukung penuh tujuan mengembalikan kejayaan Amerika Serikat melalui penguatan sektor industri dan manufaktur dalam bidang ekonomi..

AS telah menjadi salah satu dari donor utama dalam hal pembiayaan penyediaan fasilitas dan teknologi bersama Jepang, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, dan Norwegia dimana AS menyumbang sekitar 21% dari total saham senilai US \$ 9,6 miliar antara 2011 dan 2012. Pada pemerintahan Presiden Donald Trump, terjadi pemotongan tajam pada pendanaan iklim global oleh AS. 2018 sebesar \$140 juta untuk pendanaan iklim multilateral, \$135 milyar untuk *Multilateral Development Bank*, namun pendanaan untuk program dan organisasi

⁵ Jean-Daniel Collomb, "A Worthy Heir: Donald Trump, the Republican Party and Climate Change", Lisa e-Journal, Vol. XVI , hlm. 3-8

internasional tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Pemotongan pendanaan iklim global ini juga akan berdampak pada melemahnya otoritas negosiasi iklim di masa mendatang dikarenakan kualitas laporan IPCC yang melemah. Sejak awal Trump memang telah berusaha untuk menghentikan pendanaan iklim global dalam *Green Climate Fund*, instrument pendanaan yang digunakan dalam *Paris Agreement*.⁶ Biaya operasional *Paris Agreement* yang mahal serta kesepakatan-kesepakatan yang dianggap merugikan Amerika Serikat karena dapat menghilangkan ratusan ribu lapangan pekerjaan, merusak industry-industri manufaktur, dan menghancurkan sekian triliun produk domestik bruto dimasa mendatang

Jumlah produksi energi AS mencapai 78 quadriun (\$1,000,000,000,000,000) Btu dan tingkat konsumsi energi AS mencapai 97 quadriun Btu (*British Thermal Unit*), satuan energi yang digunakan di AS). Tingkat konsumsi energi AS yang tinggi juga mendorong peningkatan produksi energi AS juga semakin tinggi agar dapat mengimbangi besarnya penggunaan energi AS. Sebagian besar konsumsi maupun produksi energi AS masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil. Industri AS sendiri memang masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, dimana impor utama AS merupakan minyak mentah sedangkan ekspor utamanya berupa produk petroleum, batu bara dan minyak bumi.

Penggunaan bahan bakar fosil dinilai lebih sangat efektif daripada energi bersih dan terbarukan meskipun lebih mahal namun mudah ditemukan, tersedia dalam jumlah yang banyak dimana AS diketahui merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia, mudah dipindahkan atau didistribusikan, memberikan peluang kerja yang banyak, dan lebih mudah diatur asalkan bahan bakar untuk dijadikan tenaga tersedia. Berbeda dengan energi terbarukan yang tidak terbatas namun bergantung pada sumber-sumber alami seperti matahari, air, angin, serta biaya pembangunan teknologi dan eksplorasi atau pemeliharaan bisa

⁶ Fadhlhan Nur Hakiem, “*Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement*”. *Dauliyah*, Vol. 3, No. 2, July 2018, hlm. 164.

menjadi tinggi dan tidak lebih efektif dan efisien dalam penyaluran atau transport energi.

Berdasarkan data dari Biro Sensus AS, tingkat ekspor dan impor AS terus meningkat signifikan hingga 10 kali lebih besar dari nilai ekspor, lebih dari \$400 milyar pada 2007. Tingkat impor energy AS menurun sangat signifikan menjadi 1,5 kali lipat dari ekspor energi AS pada tahun 2007. Dua pertiga dari total nilai impor energi AS berupa minyak mentah, termasuk produk minyak bumi seperti LPG, bahan bakar diesel, dan bensin. Mitra dagang energi terbesar AS adalah Kanada. Import energy dari Kanada AS pada tahun 2017 mencapai \$ 73 miliar, diikuti oleh Arab Saudi kemudian Venezuela, Meksiko, Iraq, Kolumbia, dan Rusia. Mitra-mitra dagang energy utama AS tersebut menyumbang 72% dari total nilai energy AS.⁷ Sedangkan, ekspor sebagian besar jenis energi yang diekspor AS berupa hasil dari olahan minyak mentah yaitu produk petroleum yang digunakan sebagai bahan baku industry petrokimia. Ekspor energi AS pada tahun 2017 telah jauh meningkat daripada tahun 2007, utamanya di tujuh negara utama yang secara konsisten menjadi tujuan ekspor energy AS yakni, Mexico, Canada, Brazil, China, Netherland, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2018 dibawah kepemimpinan Donald Trump, untuk pertama kalinya setelah 75 tahun AS menjadi negara net-eksportir minyak mentah sebagai terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap impor minyak mentah.

Platform Partai Demokrat yang sangat pro energi melihat bahwa kesepakatan dan ketentuan yang melibatkan AS dalam *Paris Agreement* akan sangat mempengaruhi pergerakan ekspor dan impor energi AS. Tingginya tingkat konsumsi AS yang tinggi juga mendorong tingkat produksi energi AS yang sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil Penurunan emisi gas karbon dapat dicapai dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi bahan bakar utama industri-industri AS, utamanya kepentingan untuk kebutuhan produksi dan ekspor energi AS berupa produk petroleum, batu bara, dan gas alam karena dinilai lebih efektif meskipun mahal namun lebih mudah

⁷ U. S. Energy Information Administration, “*Today In Energy*“, diakses dari <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37253> pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 20.31 WIB

ditemukan, lebih efisien dalam proses pembangunan teknologi hingga distribusi energi. Dengan berkurangnya tingkat produksi perhari maupun jangka waktu yang lebih panjang dalam pengelolaan energi terbarukan dapat mengurangi efisiensi ekspor energi AS, dimana hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan negara-negara tujuan ekspor AS terhadap pasokan energi AS sebagai pemasok utama yang memasok energi-energi berupa produk petroleum sebagai produk ekspor utama AS termasuk batubara serta gas alam. AS juga merupakan pemasok utama batubara didunia, kedua terbesar setelah Chinayang tercatat mencapai 11% dari total kebutuhan batu bara dunia dimana 37% produksi listrik AS bergantung pada batu bara. AS juga merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia sebesar 237 miliar ton.⁸ Tingginya tingkat produksi dan ekspor utama AS dalam jenis energi produk petroleum, batu bara, dan gas alam ini menjadi pertimbangan utama yang mendorong Trump menarik AS keluar dari *Paris Agreement*. Secara teknis, penarikan diri AS dari kesepakatan berarti mengurangi beban tanggungjawab keterlibatan AS dalam kesepakatan tersebut terutama mengenai kontribusi keuangan.

Didalam *Paris Agreement* terdapat diferensiasi diantara negara maju dan negara berkembang yang ditentukan dalam golongan negara *Annex 1* dan negara *Non-Annex 1*. Negara *Annex 1* meliputi negara-negara maju yang dianggap dapat segera mereduksi emisi gas karbon, sedangkan negara *Non-Annex 1* meliputi negara-negara berkembang yang dianggap belum siap untuk segera melakukan reduksi emisi gas karbon. Beban yang dirasa tidak proporsional oleh negara-negara maju membuat sistem pembagian *Annex* tersebut mempengaruhi kurangnya partisipasi dari beberapa negara dengan tingkat emisi yang tinggi misalnya China dan India yang juga merupakan pemain kunci bersama AS dalam *Paris Agreement*. Posisi China sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar dan India sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga setelah AS namun keduanya tergolong dalam negara *Non-Annex 1* sehingga keduanya memiliki ketentuan pengurangan emisi yang lebih fleksibel berdasarkan tingkat dan

⁸ World Atlas, "The Top 10 Coal Producers Worldwide", diakses dari <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-10-coal-producers-worldwide.html> pada 7 Maret 2019 pukul 21.37 WIB

perkembangan pembangunan China maupun India. Selain itu, dalam bidang energi, China menempati posisi pertama sebagai pemasok utama batu bara sekitar 47% dari total pasokan batubara di dunia. Sedangkan, AS berada diperingkat kedua setelah China yang memasok sekitar 13% dari total pasokan batu bara di dunia sekaligus konsumen batubara terbesar. Kekhawatiran kalangan Partai Republik dan kalangan konservatif terhadap kemungkinan menguatnya daya saing industry China dan India dapat melemahkan industry-industi di AS itu sendiri menjadi salah satu pertimbangan utama yang juga semakin memperkuat alasan penarikan AS dari *Paris Agreement* dibawah kepemimpinan Donald Trump.

Keluarnya AS dari *Paris Agreement* menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan tata kelola iklim global. Ketidakpastian tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi China. Disatu sisi, China bisa saja maju dan menguatkan peran untuk mengambil alih kepemimpinan tata kelola iklim global dengan memanfaatkan ketidakpastian yang diberi oleh AS. Dalam skala global, meskipun China ingin mengambil alih kepemimpinan iklim global menggantikan AS, kapasitas pembangunan China belum cukup memadai untuk mengisi kekosongan kepemimpinan akibat keluarnya AS dari *Paris Agreement*. Dengan terbangunnya kekuasaan produktif AS dalam rezim perubahan iklim, dimana AS berkontribusi hingga 18,89% emisi gas karbon.⁹ AS juga merupakan pendonor utama dalam pendanaan, alih teknologi, dan pembangunan kapasitas negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh besar dalam mekanisme *Paris Agreement*, maka saat AS memutuskan untuk menarik diri dari *Paris Agreement*, kekuasaan produktif AS tidak akan hilang bergitu saja. Keluarnya AS dalam Paris Agreement ini tidak serta merta membuat dunia mempertanyakan kepemimpinan AS dalam rezim perubahan iklim. Jika diamati kembali, hal itu akan semakin mempertegas posisi kepemimpinan global AS sebagai satu-satunya negara yang dianggap adidaya. Melalui kekuasaan produktif AS, ketergantungan rezim perubahan iklim terhadap keberadaan AS akan semakin nampak jelas karena

⁹ Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 7 Maret 2018 pukul 19.16 WIB.

perilaku dan tindakan AS akan mempengaruhi perilaku dan tindakan negara-negara lain dalam bentuk ketidakpuasan dan keraguan negara-negara industri maupun negara-negara sekutu AS terhadap efektivitas rezim perubahan iklim sebagai efek domino dari penarikan diri AS.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan penarikan diri AS dari *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017. *Paris Agreement* merupakan kesepakatan iklim yang dibentuk pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis, sebagai agenda iklim lanjutan atau pengganti dari berakhirnya *Kyoto Protokol* 1997 yang dibentuk dibawah naungan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Kesepakatan ini dibuat dalam rangka mereduksi gas emisi karbon untuk mengantisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim akibat semakin tingginya temperature bumi akibat tingginya emisi gas karbon terutama dari penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan dalam setiap aktivitas di industri-industri modern.

Latar belakang Trump sendiri berasal dari seorang pebisnis. Adanya *gap* yang tinggi antara kalangan konservatif dan kalangan liberal yang diperjelas dengan adanya dua partai utama AS yakni Partai Republik dan Partai Demokrat dalam sejumlah isu termasuk isu perubahan iklim membuat perubahan pola kebijakan AS bisa menjadi sangat signifikan. Arah dan pola kebijakan Trump akan searah dengan ortodoksi platform Partai Republik. Mahalnya pembiayaan kebijakan iklim dianggap tidak sepadan, Lebih baik digunakan untuk pengembangan sektor energy dan industry bahan bakar fosil, hal ini pun tidak terlepas dari kalangan pendukungnya yang sebagian besar berasal dari kalangan professional dan pengusaha.

Tujuan dan mekanisme *Paris Agreement* juga tidak sesuai dengan platform Partai Republik yang menjadikan pengembangan produksi dan ekspor energi sebagai agenda utama. Terlebih lagi, diferensiasi kewajiban dan tanggung jawab pembiayaan mitigasi negara maju dan negara berkembang yang dikemas dalam kategori negara *Annex 1* dan negara *Non-Annex 1* dianggap tidak adil atau tidak

proporsional sehingga justru menguntungkan negara berkembang dengan adanya dukungan finansial, alih teknologi, maupun kapasitas pembangunan dari *Annex 1*, namun mengancam keberlangsungan industri-industri AS dan dominasi ekonomi AS di dunia.

Kesepakatan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian AS sebagai negara industri besar yang menggunakan bahan bakar fosil disebagian besar aktifitas di industry AS dan lain-lain dilihat dari tingginya tingkat kebutuhan energi AS baik berupa konsumsi maupun produksi energi AS. Sebagian besar impor AS adalah berupa minyak mentah yang kemudian diolah menjadi produk metrolium dan diekspor ke berbagai negara tujuan ekspor AS. Eskpor AS didominasi oleh produk petrolium, batu bara, dan gas alam. Apalagi AS merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia sehingga untuk beralih ke energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil akan mengganggu pergerakan dan penjualan energi AS sebagai negara pemasok energi utama di dunia dengan stok atau cadangan energi fosil yang sangat besar. China sebagai pemasok utama batu bara di dunia mencapai 47% dari total pasokan batu bara di dunia sebagai negara berkembang dengan tingkat ekspansi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat diikuti oleh India juga mengancam dominasi dan daya saing AS dengan posisi AS sebagai negara *Annex 1*.

REFERENSI

Climate Analytics. (n.d.). *Paris Agreement Ratification Tracker*. Retrieved Maret 2018, 7, from Climate Analytics:

<https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/>

Collomb, J.-D. (2014). The Ideology of Climate Change Denial in the United States. *European Journal of American Studies*, 2.

EIA. (2018, 10 16). *Today In Energy U. S.* Retrieved 3 8, 2019, from Energy Information Administration:

<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37253>

Hakim, F. N. (2018). Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*

Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume IV No.II*, 19.

Holsti, K. J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis, 6th ed.* Jersey: Prentice Hall International.

States, U., & Obama, T. (n.d.). Factsheet Yes , He Can : President Obama ' s Power to Enter a Legally Binding Agreement Without Waiting for Congress, 2(C), 21–23.

The Committee on Arrangements for the 2016 Republican National Convention. (2016). *Republican Platform 201*. US: Republican National Convention.

UNTC. (2018, 11 8). *Chapter XXVII Paris Agreement*. Retrieved 11 9, 2018, from United Nations Treaty Collection:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=_en&clang=_en

World Atlas. (n.d.). *The Top 10 Coal Producers Worldwide*. Retrieved 3 7, 2019,
from World Atlas: <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-10-coal-producers-worldwide.html>

Zhang, H. Bin, Dai, H. C., Lai, H. X., & Wang, W. T. (2017). U.S. withdrawal
from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response.
Advances in Climate Change Research, No. 8, 220–225